

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan beranggapan bahwa ketika seorang Auditor memberikan sebuah opini wajar tanpa pengecualian, maka opini tersebut dijadikan jaminan bahwa perusahaan tidak menderita kerugian dalam kurun waktu yang dekat, dan menuju kebangkrutan dalam waktu yang panjang. Hal ini mengakibatkan kebanyakan Auditor sering dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian-kerugian, bahkan kebangkrutan yang dialami oleh suatu perusahaan. Auditor sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk mengestimasi suatu kebangkrutan perusahaan, namun disisi lain investor berharap mendapatkan sinyal peringatan dini (early warning signal) dari Auditor mengenai keberlangsungan hidup perusahaan mereka (Chen dan Church, 1996 dalam Akbar dan Ridwan, 2019).

Manipulasi laporan keuangan dan kecurangan semakin banyak terjadi di beberapa perusahaan besar. Pertama kali terjadinya kasus besar yang terjadi pada perusahaan Enron mengenai manipulasi laporan keuangan perusahaan telah membuat banyak pihak dan pengguna laporan keuangan resah, terlebih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat pada kasus ini merupakan KAP *big five* yaitu Arthur Andersen. Pada tahun sebelum terjadinya kebangkrutan, KAP Arthur Andersen yang bertugas untuk mengaudit memberikan opini wajar tanpa pengecualian namun setelah diselidiki kembali ternyata perusahaan Enron mengalami kerugian yang amat besar.

Di Indonesia sendiri kasus mengenai bangkrutnya suatu perusahaan setelah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian telah cukup banyak terjadi, misalnya kasus yang terjadi pada awal tahun 1990 pada bank Summa, yang mendapatkan laporan audit yang wajar tanpa pengecualian akan tetapi mengalami kebangkrutan pada periode

berikutnya. Pemerintah sejak 1 November 1997 melakukan likuidasi terhadap beberapa perusahaan, di antaranya Bank Ratu dan Bank Prasadha Utama yang pada tahun 2000 diberhentikan oleh pemerintah. Kantor akuntan publik yang bertugas membuat laporan audit perusahaan menyatakan perusahaan dalam kondisi baik namun kenyataannya dalam keadaan yang buruk.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghapusan pencatatan (delisting) pada saham perusahaan pertambangan PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA). Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan di situs BEI, Rabu (18/10/2017), BEI melakukan delisting pada saham TKGA, lantaran perseroan mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum. Perusahaan pun tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Selain itu, delisting juga dilakukan lantaran saham TKGA sudah terkena suspensi dan hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Oleh karena itu, BEI pun membuka suspensi saham TKGA di pasar negosiasi dari 19 Oktober hingga 15 November 2017 dan akan menghapus saham TKGA pada 16 November 2017. Dengan dicabutnya status perseroan sebagai emiten di bursa efek, maka perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat, dan BEI akan menghapus nama perseroan dari papan perdagangan di BEI.

Hasil penelusuran media massa Okezone, saham TKGA memang kerap bermasalah. Pada 11 Mei 2016, saham TKGA dihentikan lantaran mereka belum menyerahkan laporan tahunan. Akibatnya, BEI pun kembali melakukan suspensi pada 30 Oktober 2016 disertai denda sebesar Rp150 juta. Saham TKGA pun kembali disuspensi pada akhir Januari, lantaran belum membayar listing tahunannya bersama dengan sembilan emiten lainnya. Saham TGKA kembali disuspensi pada 16 Februari 2017 dengan alasan yang sama. Adapun harga penutupan terakhir saham TKGA, yakni sebesar Rp4.300. BEI melakukan penghentian sementara pada perdagangan 20 Februari 2017 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut. Bursa menghimbau

kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan Perseroan. Sumber: (economy.okezone.com 2017)

Auditor seringkali mengalami kesulitan dalam memprediksi *going concern* (keberlangsungan hidup) sebuah entitas, dilema antara moral dan etika dialami oleh Auditor dalam menyampaikan opini audit *going concern* (Januarti, 2007, dalam Alfaizatul, 2012:8). Ketentuan AICPA (*American Institute of Certified Accountants*) mengharuskan Auditor untuk secara jelas menyatakan kemampuan perusahaan klien dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sebelum menentukan apakah ikut berinvestasi atau tidak, investor terlebih dahulu melakukan analisis laporan keuangan. Investor mengharapkan Auditor handal dalam memberikan informasi yang baik (Levitt, 1998 dalam Akbar dan Ridwan 2019). Fokus seorang Auditor adalah penentuan apakah informasi benar-benar mencerminkan peristiwa yang terjadi saat periode akuntansi (Arens, Elder dan Beasley, 2008 dalam kristiana, 2012:47) Keberlangsungan suatu perusahaan adalah masalah yang sangat berpengaruh bagi pihak didalam perusahaan yang mempunyai kepentingan, terutama investor. Penanaman modal dari investor diharapkan mampu untuk mendanai kegiatan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dan juga investor mengharapkan memperoleh dividen dari modal yang diinvestasikan. Maka dari itu, sebelum investor melakukan kegiatan investasi, sangat dianjurkan perlu melihat kondisi perusahaan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Semua pihak pasti menginginkan opini audit yang diharapkan, karena harga saham akan berpengaruh terhadap keputusan investor dalam menanamkan modal dan juga kehilangan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik akan berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan pada saat mendatang.

Jumlah perusahaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun ke tahun dapat menurun akibat adanya wewenang delisting yang dilakukan oleh BEI. Apabila perusahaan mengalami kondisi negatif terhadap keberlangsungan usahanya dan tidak bisa membuktikan rencana pemulihan yang memadai, maka pihak BEI berhak

menghapus pencatatan saham pada perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan bursa nomor I-I tentang pencatatan kembali (*relisting*) dan penghapusan (*delisting*). Dalam kurun waktu 5 tahun Bursa Efek Indonesia telah mendelisting 21 perusahaan sejak 2015 sampai 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa cukup banyak perusahaan yang tidak mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya sehingga membuat banyak pihak yang berkepentingan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Tabel 1.1

Data Perusahaan Bursa Efek Indonesia

Tahun	Jumlah Perusahaan Terdaftar	Pertambahan /Tahun	<i>Delisting</i>
2015	525	17	3
2016	539	31	0
2017	570	60	8
2018	622	53	4
2019	671	12	6
	Jumlah 5 Tahun	173	21

Sumber : sahamok.net (2021)

Fenomena terjadinya *delisting* ini menggambarkan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan para pemakai laporan keuangan di semua sektor perusahaan, tak terkecuali di sektor pertambangan, karena dari tabel di atas yang menyebutkan bahwa 21 perusahaan mengalami *delisting*, terdapat 4 perusahaan pertambangan yang mengalami *delisting*. Berikut merupakan tabel perusahaan pertambangan yang mengalami *delisting*:

Tabel 1.2

Perusahaan Pertambangan yang Mengalami *Delisting*

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Tanggal <i>Delisting</i>
1	BRAU	PT Berau Coal Energy, Tbk	16/11/2017
2	TKGA	PT Permata Prima Sakti, Tbk	16/11/2017
3	JPRS	PT Jaya Pari Steel, Tbk	08/10/2018
4	ATPK	PT Bara Jaya Internasional, Tbk	30/09/2019

Sumber : sahamok.net (2021)

Faktor pengukur yang dapat menentukan opini *going concern* sangat diperlukan karena *going concern* adalah masalah kompleks dan akan terus terjadi, sehingga investor dapat menjadikannya acuan dalam investasinya. Fenomena opini audit *going concern* telah menarik perhatian para peneliti dalam melaksanakan pengkajian *going concern* dengan keterkaitannya bersama variabel lain, dalam penelitian ini peneliti meninjau dari faktor kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi KAP (Junaidi dan Hartono 2010:1 dalam Saputra 2017:684).

Buruknya kondisi keuangan akan mengakibatkan kesempatan untuk mendapatkan kualifikasi *going concern opinion* semakin tinggi, begitupun jika kondisi keuangan yang baik, maka peluang memperoleh opini *going concern* semakin kecil. Banyak kasus yang terjadi saat kondisi keuangan buruk tetapi perusahaan berusaha untuk menampilkan laporan keuangan yang baik di hadapan para pengguna laporan keuangan tersebut, akibatnya pendapat Auditor akan terpengaruh penyajian pada laporan keuangan, padahal laporan keuangan tidak menyajikan hal-hal yang memperlihatkan kondisi keuangan tersebut buruk. Hal ini menjadikan kondisi keuangan perusahaan termasuk kedalam faktor yang mempengaruhi opini *going concern*. Kasus manipulasi data yang terjadi belum lama ini dialami oleh bank Bukopin yang diduga melakukan manipulasi data kartu kredit, telah terjadi selama 5 tahun

dengan pemodifikasian data kartu kredit. Situasi ini juga dianggap serius karena KAP yang bertugas di Bukopin adalah KAP yang berafiliasi dengan Erns dan Young yang merupakan salah satu KAP *big four*.

Auditor beranggapan bahwa perusahaan besar akan lebih memiliki kemampuan menyelesaikan kondisi keuangannya dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki peluang untuk menerima *going concern opinion*. Ukuran perusahaan yang besar akan lebih memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan karena perusahaan besar akan lebih mudah memenangkan persaingan. Misalnya ketika dua perusahaan di dalam satu industri bersaing untuk mendapatkan sumber pendanaan, maka ukuran perusahaan menjadi penentu para pemberi dana untuk menginvestasikan dananya, dan secara langsung perusahaan yang mendapatkan dana akan lebih mampu untuk melanjutkan usahanya. Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *going concern opinion*. Namun pada kenyataannya sebesar apapun perusahaan tidak terlepas kemungkinannya dari potensi kebangkrutan.

Pertumbuhan perusahaan menggambarkan kemampuan entitas untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya. Ditinjau dari faktor pertumbuhan perusahaan, sektor pertambangan adalah sektor yang sangat rentan terjadinya kebangkrutan, karena data menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan di sektor ini merupakan pertumbuhan yang paling rendah di antara sektor lainnya. Kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya bisa bergantung dari pertumbuhan perusahaan. Menurut Statistik, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan relatif sangat kecil dibanding dengan sektor lainnya dan mempunyai tingkat pertumbuhan yang rendah dari tahun ke tahun. Di bawah merupakan data statistik tingkat pertumbuhan PDB dari sisi sektoral dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 1.3
Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,75	3,36	3,87	3,91	3,64
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22
3	Industri Pengolahan	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,07	3,60	4,60	5,46	6,83
6	Konstruksi	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	2,54	4,03	4,46	4,97	4,62
8	Transportasi dan Perdagangan	6,71	7,45	8,49	7,01	6,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,31	5,17	5,39	5,66	5,80
10	Informasi dan Komunikasi	9,70	8,88	9,63	7,04	9,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,58	8,90	5,47	4,17	6,60
12	Real Estate	4,11	4,69	3,66	3,58	5,74
13	Jasa Perusahaan	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,63	3,19	2,06	7,02	4,67
15	Jasa Pendidikan	7,33	3,80	3,70	5,36	6,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	6,69	5,15	6,84	7,13	8,68
17	Jasa Lainnya	8,08	8,02	8,73	8,99	10,55
18	Produk Domestik Bruto	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber : www.bi.go.id (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita amati bahwa sektor pertambangan adalah sektor yang paling sedikit pertumbuhan Produk Domestik Brutonya, penurunan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi makro dan masalah ekonomi global. Hubungan Produk Domestik Bruto dengan *going concern* adalah apabila Produk Domestik Bruto terus menurun seharusnya Auditor memberikan opini audit *going concern* tetapi faktanya masih banyak perusahaan di sektor pertambangan yang belum mendapatkan opini audit *going concern*. Sehingga peneliti ingin mempelajari apakah penerimaan opini audit *going concern* dipengaruhi karena faktor pertumbuhan perusahaan.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia mencatat kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional selama 2016 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Industri ekstraktif adalah industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar atau lebih dikenal dengan perusahaan pertambangan. Kontribusi industri ekstraktif terhadap total PDB pada 2016 adalah sebesar 7 persen, turun dibandingkan posisi 2015 yaitu sebesar 8 persen dari total PDB nasional. Secara nominal, pada 2016 jumlah pendapatan dari industri ekstraktif menurun sebesar 31 persen menjadi Rp 159,4 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 232,4 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian, Montty Girianna membeberkan penyebab sektor pertambangan terus turun dalam beberapa tahun belakangan. "Salah satunya karena harga ekspor komoditas turun, tidak hanya di kita." ujar Montty saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/3/2019). Penyebab lain, kata Montty, adalah produksi Indonesia juga yang mengalami penurunan karena berbagai hal, seperti menurunnya permintaan ekspor batubara dan nikel oleh pihak negara luar yang sudah mengurangi penggunaan komoditi tersebut dan juga kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk menaikkan nilai jual komoditi nikel menjadi bahan jadi seperti batu baterai. Selain itu, PDB dari pertambangan masih mendapatkan tekanan harga minyak yang masih belum pulih khususnya pada 2016. Pada 2016, kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional sekitar 21 persen. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Ekspor migas berkontribusi sekitar 8,4 persen dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 10 persen dari total nilai ekspor nasional. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di 2016 adalah Riau dengan nilai ekspor sebesar USD 2.254 juta dan penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar USD 2.782 juta. Sumber: Merdeka.com.

Hal ini relevan dengan alasan beberapa perusahaan pertambangan yang mengalami *delisting* yang disebabkan oleh penurunan permintaan ekspor dari luar negeri yang berakibat pada penurunan produksi produk pertambangan sehingga perusahaan mengalami kerugian bahkan hingga *delisting*.

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kinerja audit para Auditor eksternal pada sebuah perusahaan. Kualitas kantor akuntan publik bisa juga diproksikan dengan kualitas Auditor, karena Auditor yang bertugas menilai laporan keuangan pasti dibawah naungan kantor akuntan publik tempat dia bekerja. Besarnya KAP dapat dikategorikan menjadi *big four* dan *non big four*. Kantor akuntan publik yang terafiliasi *big four* memiliki reputasi yang tinggi daripada bukan dari *big four*, reputasi yang tinggi memudahkan kantor akuntan publik untuk memilih klien, sehingga mereka cenderung memilih klien yang tidak bermasalah dengan keberlangsungan perusahaan mereka. KAP yang mempunyai reputasi baik akan menerbitkan *going concern opinion* apabila terdapat permasalahan keberlangsungan usaha di perusahaan tersebut. Hal ini menjadikan reputasi KAP menjadi tolak ukur pertama dalam menilai keadaan perusahaan untuk memberikan opini audit *going concern*. Kualitas audit yang tinggi dapat diberikan oleh KAP yang terafiliasi *big four* karena mereka dinilai lebih independen dalam memberikan opini audit. Kenyataan yang terjadi adalah seberapa baik pun reputasi yang dimiliki oleh kantor akuntan publik tidak menjamin bahwa KAP tersebut dapat memprediksi keberlangsungan hidup perusahaan, terbukti dengan kasus yang terjadi di Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen yang akhirnya bangkrut setelah diberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan ulasan di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN REPUTASI KAP TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kondisi keuangan perusahaan pertambangan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan pertambangan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
3. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan perusahaan pertambangan terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
4. Seberapa besar pengaruh reputasi KAP terhadap opini audit *going concern* perusahaan yang terdaftar di BEI Sektor Pertambangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
5. Seberapa besar pengaruh kondisi keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi KAP secara bersama-sama terhadap opini audit *going concern* perusahaan yang terdaftar di BEI Sektor Pertambangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 4 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh reputasi KAP terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- 5 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi KAP secara bersama-sama terhadap opini audit *going concern* perusahaan yang terdaftar di BEI Sektor Pertambangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu akuntansi untuk menambah pengetahuan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam bidang Audit. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi atau sebagai sumber informasi baik bagi pihak-pihak yang tertarik pada topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi beberapa kalangan, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan reputasi KAP terhadap penerimaan opini audit *going concern* (studi empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019).

b. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi universitas adalah dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang, khususnya program studi akuntansi.

c. **Bagi Peneliti Lain**

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi peneliti lain adalah dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda dan variabel yang lebih banyak lagi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website www.idx.co.id serta situs-situs lainnya yang berkaitan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2021																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Acc Judul																								
3	Penyusunan BAB I	■	■																						
4	Penyusunan BAB II			■	■																				
5	Penyusunan BAB III					■	■	■																	
6	Pengajuan Seminar							■																	
7	Seminar								■																
8	Penyusunan BAB IV									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Penyusunan BAB V																								
10	Perbaikan proposal																							■	
11	Sidang																								■
12	Revisi Skripsi																								■

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2021)